

Peningkatan Kinerja Dan Tata Kelola Ekspor Dalam Rangka Meningkatkan Cadangan Devisa Untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam beberapa rapat pada siklus pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019, pemerintah bersama DPR khususnya Panja Asumsi Makro Banggar DPR RI sementara ini menyepakati pertumbuhan akan mencapai 5,2%-5,6% yang disertai dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebesar Rp13.700-Rp14.000. Hal tersebut cukup berisiko karena dengan mematok nilai tukar Rupiah yang lebih rendah akan berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga dan pokok hutang dalam APBN dan perlambatan investasi sektor swasta sehingga target pertumbuhan ekonomi berpotensi meleset. Namun, dibalik asumsi pelemahan kurs nilai tukar tersebut menurut pemerintah juga terdapat optimisme untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Apabila berbicara tentang kinerja ekspor Indonesia, Sejak 2012, pertumbuhan ekspor negatif karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah, dan anjloknya permintaan, dan harga komoditas. Ketika permintaan komoditas anjlok atau dikenai bea masuk maka ekspor pun akan menurun. Selama ini, sekitar 60% dari ekspor Indonesia terdiri atas komoditas seperti gas, batu bara, produk mineral, dan kelapa sawit. Selain itu, input untuk menghasilkan barang ekspor baik bahan baku maupun mesin tersebut ternyata adalah barang impor begitu juga dengan kapal pengangkutnya. Secara garis besar terdapat permasalahan di sisi logistik dan ketergantungan akan komoditas yang mana menurut beberapa ekonom ketika terjadi pelemahan kurs nilai tukar tidak otomatis mendongkrak nilai ekspor.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor meningkat pesat sebesar 15,8% dari US\$ 145 miliar di tahun 2016 menjadi US\$ 168 miliar dan surplus kurang lebih US\$ 12 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 cukup baik, namun ternyata masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia (US\$231 miliar dan US\$184 miliar).

Apabila Indonesia memiliki fondasi ekspor yang baik, maka kinerja ekspor Indonesia tentu akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja ekspor akan berdampak pada ketahanan perekonomian nasional suatu negara terutama dalam bentuk cadangan devisa. Ketika sebuah negara memiliki cadangan devisa yang besar maka negara tersebut tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uangnya akibat dinamika perekonomian global. Sebagai contoh, Tiongkok dengan cadangan devisanya yang besar dapat mematok nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang negara lain (*fixed exchange rate*). Sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem *floating exchange rate* (mengambang), yang berarti bahwa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar dan tidak mematok dikisaran tertentu.

Perkembangan terakhir menyatakan bahwa Nilai cadangan devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Januari 2018 sebesar US\$ 131,98 miliar. Namun, ternyata cadangan devisa juga menyusut cepat dalam empat bulan berturut-turut. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2018 sebesar US\$ 122,9.

Rekor cadangan devisa merosot sejak nilai tukar rupiah terus tertekan pada Februari 2018. Saat itu kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) melewati Rp 13.500. Tekanan rupiah mencapai puncak pada Mei 2018 saat menembus Rp 14.000 per dollar. Perkembangan terakhir pada tanggal 6 Juli 2017, nilai tukar rupiah terhadap dollar menembus Rp14.400/US\$. Dalam jangka panjang, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak boleh bergantung dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor. Kebijakan menaikkan suku bunga ini hanya bagus untuk jangka pendek dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ekonom dan kalangan perbankan menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia masih cukup aman untuk digunakan dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, mereka menyatakan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk terus menggenjot ekspor dan menekan impor. Dalam rangka memperkuat nilai tukar Rupiah melalui peningkatan cadangan devisa, perlu adanya peningkatan kinerja dan tata kelola ekspor Indonesia yang dapat dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekspor dengan melakukan perbaikan nilai tambah dan efisiensi dari sektor industri, meningkatkan inovasi dan produktivitas di semua sektor agar tidak bergantung pada komoditas;
2. Perluasan pasar tujuan ekspor ke negara lain seperti Rusia, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk itulah perlu adanya optimalisasi peran Atase Perdagangan di negara sahabat serta perbaikan birokrasi;
3. Perlu adanya insentif terhadap eksportir agar membawa uang dollar yang mereka peroleh untuk dibawa ke Indonesia. Perlu ada tinjauan mengenai UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana eksportir tidak diwajibkan membawa uang dollar ke Indonesia;
4. Sosialisasi dan juga insentif pemanfaatan instrumen keuangan kepada para eksportir dalam bentuk *forward/ future contract* valuta asing (*hedging*) untuk melindungi nilai kontrak pada saat jatuh tempo pembayaran.